

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
(Studi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa
Tahun Anggaran 2014)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

M. ZAENUDDIN ASYROFI
NIM. 12030113183005

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : M. Zaenuddin Asyrofi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113183005
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH** (Studi atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau
Jawa Tahun Anggaran 2014)
Dosen Pembimbing : Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 9 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



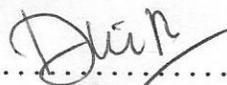
(Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.)
NIP. 198010012008011014

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

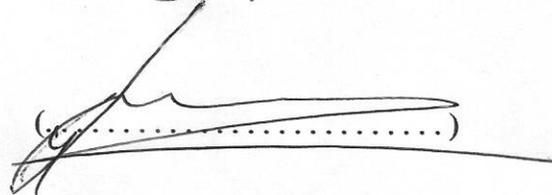
Nama Penyusun : M. Zaenuddin Asyrofi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113183005
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH** (Studi atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau
Jawa Tahun Anggaran 2014)

Tim penguji

1. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.

(..........)

2. Sudarno, Ph.D

(..........)

3. Dr. Rr. Sri Handayani, M.Si., Akt.

(..........)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, M. Zaenuddin Asyrofi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun Anggaran 2014)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



(M. Zaenuddin Asyrofi)

NIM. 12030113183005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, total aset, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan temuan audit. Variabel kekayaan daerah diproksikan dengan jumlah realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Variabel total aset menggunakan logaritma natural dari total aset.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pulau Jawa tahun anggaran 2014. Dalam pengambilan sampel, digunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh data penelitian sebanyak 103 laporan keuangan. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Total aset dan temuan pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel jumlah SKPD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Kata Kunci: Tingkat pengungkapan LKPD, Kekayaan Daerah, Total Aset, Jumlah SKPD, Temuan Audit

ABSTRACT

This research aims to analyze factors affecting disclosure level of Local Government Financial Report (LGFR) based on Government Accounting Standard. Independent variables in this research are wealth, total asset, number of functional differentiation, and audit findings. Wealth is measured by realized of revenue while total asset is measured by natural logarithm of total asset.

Population of this research are Local Government Financial Report (LGFR) in Javanese Island fiscal year 2014. Purposive sampling method is used to determine the number of samples which consist of 103 financial reports. The hypothesis in this research was tested using multiple linear regression.

The results show that wealth have positive effect on disclosure level of LGFR. While total asset and audit findings have negative effect on disclosure level of LGFR. However, number of functional differentiation has no significant effect on the disclosure level of LGFR.

Keywords: Disclosure level of LGFR, Wealth, Total Asset, Number of Functional Differentiation, Audit Findings

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dikaruniakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun Anggaran 2014)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Sebuah perjuangan akademis yang harus dilalui oleh para sarjana. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam penelitian ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena rahmat dan kuasa-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
2. Ibu, atas doa dan dukungan yang tak pernah putus.
3. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
4. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si. Akt. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberi arahan hingga selesainya skripsi ini.

5. Fuad, S.E.T, M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt. selaku dosen wali.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip atas ilmu yang bermanfaat, pengetahuan baru dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan.
8. Saudara-saudaraku tersayang (mas Tain, mas Ulum, dan dek Irfan) yang selalu mendukung dan membantu dalam setiap masalah.
9. Muhammad Sahlan, Imron Kamil, dan Dwi Nugraha W. sebagai rekan seperjuangan atas dorongan dan motivasi yang luar biasa.
10. Teman-teman kelas kerja sama BPK 2013 (Nawa, Ikhlas, Rifan, Upik, Putri, Hei, dan Dhana) atas kebersamaan selama 2 tahun yang sangat berkesan.
11. Teman-teman KKN Desa Kalipucang Wetan (Bahar, Ella, Iren, Sulis, Polin, dan Asri) atas kebersamaan dan keceriaannya.
12. Rekan-rekan Diponegooners dan Arsenal Indonesia Supporter Regional Semarang yang banyak meluangkan waktu untuk menikmati indahny tinggal di Semarang.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis untuk perbaikan di masa mendatang. Besar harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 9 Juni 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P4R', with several horizontal lines drawn underneath it.

(M. Zaenuddin Asyrofi)
NIM. 12030113183005

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 14 |
| 2.1. Landasan Teori | 14 |
| 2.1.1. Teori <i>Stewardship</i> dalam Pemerintahan..... | 14 |
| 2.1.2. Organisasi Sektor Publik..... | 16 |
| 2.1.3. Pemerintah Daerah di Indonesia..... | 16 |
| 2.1.4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... | 18 |
| 2.1.5. Standar Akuntansi Pemerintahan..... | 20 |
| 2.1.6. Pengungkapan LKPD dalam CaLK..... | 24 |
| 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu..... | 30 |
| 2.3. Kerangka Pemikiran | 33 |
| 2.4. Rumusan Hipotesis..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| 3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 41 |
| 3.1.1. Variabel Penelitian..... | 41 |
| 3.1.2. Definisi Operasional Variabel..... | 41 |
| 3.2. Populasi dan Sampel..... | 46 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data | 47 |
| 3.4. Metode Pengumpulan Data..... | 48 |
| 3.5. Metode Analisis | 48 |
| 3.5.1. Analisis Deskriptif..... | 48 |
| 3.5.2. Uji Beda <i>T-test</i> dengan Sampel Independen..... | 49 |

| | | |
|--------|---|----|
| | 3.5.3. Uji Asumsi Klasik..... | 49 |
| | 3.5.4. Uji Model..... | 51 |
| | 3.5.5. Uji Hipotesis..... | 52 |
| BAB IV | HASIL DAN ANALISIS..... | 54 |
| | 4.1 Deskripsi Objek Penelitian..... | 54 |
| | 4.2 Analisis Data..... | 55 |
| | 4.2.1 Statistik Deskriptif..... | 55 |
| | 4.2.2 Uji Beda <i>T-test</i> dengan Sampel Independen..... | 63 |
| | 4.2.3 Uji Asumsi Klasik..... | 65 |
| | 4.2.3.1 Uji Normalitas..... | 65 |
| | 4.2.3.2 Uji Multikolinieritas..... | 66 |
| | 4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas..... | 67 |
| | 4.2.4 Uji Model | 68 |
| | 4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi..... | 68 |
| | 4.2.4.2 Uji Anova (uji F)..... | 69 |
| | 4.2.5 Uji Hipotesis | 70 |
| | 4.2.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (uji statistik t)..... | 70 |
| | 4.3 Interpretasi Hasil..... | 71 |
| | 4.3.1. Pengaruh Kekayaan Daerah (PAD) terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD..... | 71 |
| | 4.3.2. Pengaruh Total Aset terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD..... | 73 |
| | 4.3.3. Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD..... | 75 |
| | 4.3.4. Pengaruh Jumlah Temuan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD..... | 77 |
| BAB V | PENUTUP..... | 79 |
| | 5.1 Simpulan..... | 79 |
| | 5.2 Keterbatasan..... | 79 |
| | 5.3 Saran..... | 80 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 84 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010..... | 20 |
| Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu..... | 30 |
| Tabel 4.1 Ringkasa Populasi dan Sampel Penelitian..... | 55 |
| Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Tingkat Pengungkapan LKPD..... | 56 |
| Tabel 4.3 Rincian Jumlah Item Checklist pada Masing-masing Kategori Pengungkapan..... | 58 |
| Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Masing-masing Kategori (CTA)..... | 60 |
| Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Masing-masing Kategori (Akrual)..... | 61 |
| Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Independen..... | 62 |
| Tabel 4.7 Uji Beda <i>t-test</i> dengan Sampel Independen | 65 |
| Tabel 4.8 Uji Non-parametrik <i>Kolmogorov-Smirnov</i> | 66 |
| Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas..... | 67 |
| Tabel 4.10 Uji <i>Glejser</i> | 68 |
| Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi (Uji t) | 69 |
| Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis | 71 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 34 |
| Gambar 4.1 Perbandingan Tingkat Pengungkapan per Masing-masing Kelompok Kategori Pengungkapan..... | 59 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | Halaman |
|-------------|--|---------|
| Lampiran A1 | <i>Checklist</i> Pengungkapan LKPD - Kas Menuju Akrua..... | 84 |
| Lampiran A2 | <i>Checklist</i> Pengungkapan LKPD - Akrua..... | 92 |
| Lampiran B1 | Data yang Digunakan | 100 |
| Lampiran B2 | Data Outlier..... | 104 |
| Lampiran C1 | Hasil Uji Statistik Deskriptif..... | 105 |
| Lampiran C2 | Hasil Uji Beda <i>T-test</i> dengan Sampel Independen..... | 106 |
| Lampiran C3 | Hasil Uji Asumsi Klasik | 107 |
| Lampiran C4 | Hasil Uji Analisis Regresi | 109 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktik akuntansi sektor publik terutama oleh entitas pemerintah saat ini semakin banyak mendapat perhatian dibanding masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Khasanah, 2014). Tuntutan tersebut mengakibatkan perlu adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mampu memberikan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih. Sebagai upaya konkrit untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Undang-Undang Nomor 23/2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang “Pemerintahan Daerah” menyatakan bahwa masing-masing pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, wajib membuat laporan keuangannya sendiri. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang “Keuangan Negara”, dijelaskan lebih lanjut bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dibuat harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, dan disampaikan kepada DPR/DPRD setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggungjawaban sekaligus dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal karenanya laporan keuangan yang diaudit harus dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai.

Pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku ialah pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*). *Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter, pengungkapan wajib merupakan bagian dari SAP yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Tahun 2010, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah terbaru mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan” maka Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Perbedaan mendasar antara PP Nomor 71/2010 dengan PP Nomor 24/2005 ialah pada basis transaksi yang diberlakukan. PP Nomor 71/2010 berbasis akrual

sedangkan PP Nomor 24/2005 berbasis kas menuju akrual. Perbedaan lainnya ialah pada PP Nomor 71/2010 terdapat dua lampiran.

Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun anggaran 2015 meskipun telah berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi penahapan pemberlakuan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri). Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual hanya berlaku hingga tahun anggaran 2014. Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP Nomor 24/2005 tanpa adanya perubahan.

Standar akuntansi sangat penting diperlukan sebagai pedoman dan petunjuk dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai PP Nomor 71/2010. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang “Keuangan Negara” yang mengamanatkan bahwa “laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang “Perbendaharaan Negara” yang juga mengamanatkan “penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP Nomor 71/2010 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga komponen yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory report*). PSAP Nomor 1 paragraf 24 menyatakan bahwa “entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran”. Begitu pula dalam paragraf-paragraf selanjutnya yang menjelaskan pentingnya pengungkapan semua informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca laporan. Dengan demikian, adanya pemenuhan atas pengungkapan akan berguna bagi pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga berisi pengungkapan dan penjelasan atas beberapa item yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian-penelitian terkait tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yang hasilnya menunjukkan bahwa persentase tingkat pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah melalui LKPD masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pemerintah daerah yang mengungkapkan secara penuh (Lesmana, 2010). Hasil penelitian Martani dan Lestiani (2012) dengan menggunakan data LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2006 menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajib LKPD sebesar 35,45%. Lesmana (2010) menyatakan tingkat pengungkapan wajib yang masih sangat rendah sebesar 22% dengan menggunakan

data LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2007. Penelitian Hilmi dan Martani (2012) menyatakan hasil yang sama bahwa tingkat pengungkapan wajib atas LKPD Provinsi di Indonesia tahun 2006-2009 masih rendah yakni sebesar 44,56%. Hasil cukup tinggi diungkapkan Setyanigrum dan Syafitri (2012), dimana tingkat pengungkapan wajib sebesar 52,09% atas LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009.

Diantara penelitian terkait pengungkapan laporan keuangan pemerintah pernah dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yaitu Ingram (1984), Laswad (2005), Patrick (2007), Hilmi dan Martani (2012), Martani dan Lestiani (2012), Setyaningrum dan Syafitri (2012), dan Khasanah (2014). Namun, terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian.

Ingram (1984) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara faktor ekonomi dan variasinya dalam praktik akuntansi pemerintahan di negara bagian di Amerika Serikat. Penelitian tersebut menggunakan empat faktor ekonomi dan politik yang digunakan sebagai variabel independen yaitu *coalition of voters*, *administrative selection process*, *alternative information source*, dan *management incentive*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *coalition of voters*, *administrative powers*, dan *management incentive* secara signifikan menjelaskan variasi kualitas pengungkapan.

Laswad (2005) melakukan penelitian pada 86 pemerintah daerah di New Zealand. Penelitian dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet pada *website* pemerintah

daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet.

Sedangkan Martani dan Lestiani (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2006. Penelitian ini menggunakan sampel 100 LKPD TA 2006 dan hasilnya menunjukkan bahwa kekayaan daerah, kompleksitas, jumlah temuan, dan tingkat penyimpangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Hasil penelitian Hilmi dan Martani (2012), Martani dan Lestiani (2012), serta Setyaningrum dan Syafitri (2012) menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang diprosikan dengan total pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Namun hal berbeda dihasilkan dari penelitian Khasanah (2014) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Setyaningrum dan Syafitri (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pada LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran daerah yang diprosikan dengan total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan, begitu juga dengan variabel jumlah SKPD (diferensiasi fungsional). Penelitian Hilmi dan Martani (2012) menunjukkan hasil yang mendukung penelitian tersebut. Namun, hal berbeda justru diungkapkan oleh Khasanah (2014) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sedangkan variabel

jumlah SKPD memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil serupa juga ditunjukkan penelitian Patrick (2007) dalam menguji karakteristik Pemerintah Daerah Pennsylvania terhadap penerapan *Governmental Accounting Standard Board (GASB) 34*. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran daerah yang diprosikan dengan total aset berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan sesuai GASB 34.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menggunakan sampel LKPD berbasis kas menuju akrual. Sehingga, pengukuran tingkat pengungkapan juga berdasarkan pada PP Nomor 24/2005 (Lampiran II PP Nomor 71/2010). Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum menerapkan basis akrual dalam pelaporannya. Penerapan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah diatur dalam PP nomor 71/2010. Peraturan Pemerintah tersebut telah mulai berlaku sejak ditetapkan, namun demikian pemerintah masih diperbolehkan menerapkan basis kas menuju akrual hingga pelaporan keuangan TA 2014. Pada tahun anggaran 2014, terdapat 7 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang telah menerapkan basis akrual. Penelitian ini menggunakan 7 Kabupaten/Kota tersebut sebagai bagian dari sampel penelitian. Sehingga, dalam mengukur tingkat pengungkapan terhadap sampel tersebut digunakan SAP berbasis akrual (Lampiran I PP Nomor 71/2010). Penelitian dengan sampel LKPD berbasis akrual menarik karena belum pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian dengan tema ini penting dilakukan dalam rangka evaluasi atas tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah sebagai

upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan sadar akan kebutuhan akuntabilitas dan transparansi melalui bentuk penilaian dan evaluasi atas pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah.

Penelitian ini menarik dilakukan karena masih jarang nya penelitian mengenai topik pengungkapan laporan keuangan di sektor pemerintahan akibat terbatasnya informasi dan data dari pemerintah yang dapat diakses publik secara bebas. Selain itu, adanya beberapa LKPD Kabupaten/Kota yang telah menerapkan basis akrual, menjadikan penelitian yang menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai sampel memiliki nilai lebih karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Serta dapat digunakan untuk menilai efektivitas penerapan basis akrual dalam LKPD.

Adanya pertentangan atas hasil penelitian dan ketidakkonsistenan hasil atas faktor-faktor penentu tingkat pengungkapan LKPD, maka diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Dengan alasan-alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui besarnya tingkat pengungkapan LKPD oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Jawa tahun anggaran 2014 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia memiliki sendiri Standar Akuntansi Pemerintahan untuk pertama kalinya tahun 2005, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005. Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 dikeluarkan

untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014, Indonesia telah memiliki SAP sendiri dan telah diterapkan selama kurang lebih 10 tahun.

Menurut Patton dan Bean (2011) dalam Khasanah (2014), Standar Akuntansi Pemerintahan sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Lesmana (2010) menjelaskan bahwa kualitas, manfaat, dan kemampuan laporan keuangan tercermin dari kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Artinya laporan keuangan yang telah mengikuti SAP telah memenuhi kriteria transparansi bagi pengguna laporan.

Melihat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah masih rendah belum sesuai standar, adanya ketidakonsistenan hasil penelitian baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan maupun tentang kisaran persentase pengungkapan yang tinggi rendah tidak stabil, penelitian yang masih jarang, dan adanya aturan pengungkapan wajib sesuai SAP untuk kepentingan kualitas dan transparansi, serta mengingat usia dari keberadaan SAP, maka penelitian dengan topik ini menarik untuk dilaksanakan. Dengan alasan-alasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui besarnya tingkat pengungkapan LKPD oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Jawa tahun anggaran 2014 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tersebut.

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen yang telah digunakan sebelumnya dalam penelitian-penelitian terkait. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah (PAD), total aset, jumlah SKPD, dan temuan audit. Alasan pemilihan keempat variabel tersebut karena dapat mewakili karakteristik pemerintah daerah dari segi kekayaan finansial, ukuran daerah, dan kompleksitas serta pengaruh eksternal melalui hasil audit.

Variabel kekayaan daerah (PAD) menunjukkan kekuatan finansial pemerintah daerah, variabel total aset menunjukkan ukuran daerah, sedangkan variabel jumlah SKPD menunjukkan kompleksitas pemerintah daerah. Ketiga variabel tersebut sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah. Variabel temuan audit yang diukur dengan jumlah temuan digunakan sebagai proksi dari hasil audit.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kekayaan daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014?
2. Apakah total aset mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014?
3. Apakah jumlah SKPD mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014?
4. Apakah temuan audit mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh positif dari kekayaan daerah (PAD), total aset, jumlah SKPD, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun anggaran 2014.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya mengenai pengaruh positif kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan pandangan kepada pemerintah daerah selaku pembuat laporan keuangan agar dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama dalam hal penyajian dan pengungkapan.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Selaku regulator dalam pembuatan Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam LKPD.

c. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tingkat pengungkapan dalam LKPD.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk memacu dan mendorong peneliti selanjutnya meneliti lebih banyak terkait dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, serta dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yakni:

1. Bab pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai gambaran fenomena dan permasalahan yang terjadi terkait dengan fenomena tersebut. Setelah uraian latar belakang masalah tersebut, ditentukan rumusan masalah yang lebih spesifik untuk menjadi bahan acuan dalam menentukan hipotesis. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai apa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Pada akhir bab dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian.

2. Bab telaah pustaka

Dalam bab II, dijelaskan mengenai berbagai landasan teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini. Setelah itu, disebutkan pula penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menyebutkan peneliti, tahun penelitian, judul penelitian, dan hasil penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki keterkaitan dengan hipotesis yang akan diajukan. Akhir bab II menjelaskan tentang kerangka pemikiran dalam penelitian dan hipotesis dari permasalahan yang diungkapkan dalam Bab I.

3. Bab metode penelitian

Bab III menjelaskan metode penelitian berupa variabel-variabel penelitian. Baik itu variabel terikat maupun bebas. Setelah itu dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel dan bagaimana cara mengukur variabel tersebut. Kemudian dijelaskan tentang jumlah dan karakteristik populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang didapatkan, serta metode pengumpulan data. Selanjutnya akan dibahas metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari obyek penelitian.

4. Bab hasil dan analisis

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian. Deskripsi tersebut menjelaskan tentang ringkasan populasi dan sampel dari objek penelitian. Setelah itu, dijelaskan mengenai hasil olahan analisis data keluaran SPSS berupa uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dan di akhir dijelaskan mengenai interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian tersebut.

5. Bab penutup

Bab V berisi tentang simpulan yang diperoleh dari hasil pengujian dan analisis. Selain itu, disebutkan pula kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penelitian ini yang diharapkan bisa dipertimbangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Terakhir peneliti memberikan saran-saran agar penelitian selanjutnya bisa dilakukan untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini dan menemukan faktor lain yang bisa diteliti lebih lanjut.